



IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH UNTUK UMKM DI KOTA BATU

Arista Fauzi Kartika Sari, Fadillah Putri, Devi Kurniawati, Verla Selvia Putri

Universitas Islam Malang

aristakartika@unisma.ac.id

DOI: [10.32815/ristansi.v6i2.2842](https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i2.2842)

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	13 Oktober, 2025
Tanggal Revisi	13 November, 2025
Tanggal diterima	15 Desember, 2025

Keywords:

Sharia
Principles,
MSMEs,
Qualitative
Research

Abstract:

This study aims to examine the implementation of sharia accounting principles and financial reporting practices of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Batu City. The method used is descriptive qualitative, which allows researchers to gain an in-depth understanding of the experiences and views of MSME actors. Primary data were obtained through interviews with eight MSME actors and direct documentation of their financial recording processes. The data analysis technique consists of three main stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that of the eight informants, only two informants did not keep records. The rest did record but only limited to income and expenses, or can be called profit and loss reports. Other informants also recorded cash flow and business debt. The informants have also implemented sharia principles in their businesses, namely honesty, fairness, accountability and freedom from usury.

Kata Kunci:

Prinsip Syariah,
UMKM,
Penelitian
Kualitatif

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dan praktik laporan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan pelaku UMKM. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan delapan pelaku UMKM dan dokumentasi langsung terhadap proses pencatatan keuangan mereka. Teknik analisis data terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 informan hanya 2 informan yang tidak melakukan pencatatan, sisanya melakukan pencatatan namun hanya terbatas pada pemasukan dan pengeluaran, atau bisa disebut laporan laba rugi, informan yang lain juga melakukan pencatatan *cash flow* dan utang usaha. Para

informan juga telah mengimplementasikan prinsip Syariah dalam usahanya, yaitu kejujuran, keadilan, pertanggungjawaban dan bebas dari riba.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Menurut KADIN Indonesia, pada tahun 2023 UMKM dapat berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan telah menyerap sekitar 117 juta pekerja atau hampir 97% dari total tenaga kerja. Data statistik menunjukkan fluktuatif setiap tahun pertumbuhan UMKM di Indonesia, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%

Sumber: KADIN, 2024

Ketahanan sector UMKM tercermin dari Tabel 1, pertumbuhan usaha yang stabil, dari 64,19 juta pada 2018 menjadi 66 juta pada 2023, meski sempat mengalami tekanan selama pandemi. Dinamika pertumbuhan yang fluktuatif namun tangguh ini—dengan puncak 2,28% (2021) dan penurunan -2,24% (2020)—justru menggarisbawahi peran strategis UMKM sebagai penyangga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional yang fluktuatif.

Namun, di balik kontribusi makroekonominya yang besar, tantangan mendasar yang dihadapi sebagian besar UMKM terletak pada aspek tata kelola dan akuntabilitas, khususnya dalam penyajian laporan keuangan. Mayoritas UMKM masih mengadopsi sistem pembukuan yang sederhana, bahkan tidak tercatat, sehingga menghambat akses terhadap pembiayaan formal dan investasi. Studi terbaru mengonfirmasi bahwa mayoritas UMKM masih bergantung pada sistem pembukuan yang sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menciptakan asimetri informasi yang membatasi akses kepada pembiayaan formal dan menghambat potensi pertumbuhan mereka (Sari & Pratama, 2023).

Padahal IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM yaitu SAK EMKM, yang dirancang secara khusus dengan

karakteristik sederhana dalam penerapannya, relevan dengan kebutuhan UMKM, mudah dipahami oleh pelaku usaha yang bukan seorang akuntan, dan biaya implementasi yang terjangkau. Namun Studi oleh Nashrullah & Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa 65% UMKM mengandalkan pencatatan manual di buku catatan biasa, sementara 25% hanya mengandalkan ingatan tanpa dokumentasi tertulis.

Paradigma akuntansi syariah tidak hanya sekadar mencatat transaksi, tetapi juga membangun nilai dan kepercayaan (amanah) secara *vertical* atau *hablum minallah* dan secara *horizontal* atau *hablum minannas* (Baydoun & Willett, 2022). Sayangnya, UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan keuangan dan akuntansi yang sesuai dengan nilai syariah. Seperti penelitian dari (Novita & Sari, 2024) yang mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi syariah di daerah mayoritas muslim masih terbatas pada tingkat dasar akibat kurangnya pelatihan, rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan sumber daya.

Seharusnya, nilai akuntansi syariah menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam berbisnis. Dalam konteks ini, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai panduan moral dan etis bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari akuntansi syariah, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, dalam Islam juga telah diatur mengenai kewajiban untuk mencatat transaksi keuangan, Maka pencatatan untuk aktivitas muamalah, dalam hal ini yaitu perdagangan sangat dianjurkan.

Kota Batu memiliki berbagai objek wisata yang menjadikannya daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata di kota apel ini, sentra UMKM juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Batu mencapai angka 25.524 yang bergerak di berbagai sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, reparasi, akomodasi dan kuliner. Pemilihan kota ini menjadi obyek penelitian yaitu karena mayoritas penduduknya beragama Islam, karakteristik UMKM yang beragam, dan banyaknya usaha UMKM di Kota Batu yang asumsinya adalah telah banyak program pelatihan keuangan untuk UMKM selain itu juga

para UMKM di Kota Batu pasti juga berkontribusi atas perkembangan wisata di sana melalui nilai Syariah yang dipraktikan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah di kalangan UMKM masih sangat terbatas. Beberapa studi menemukan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang akuntansi syariah, sehingga mereka kesulitan dalam menerapkannya dalam praktik sehari-hari (Zain & Rahman, 2020). Penelitian yang sama dilakukan oleh Novita & Sari, (2024), menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi syariah di Kabupaten Bengkalis yang mayoritas penduduknya beragama islam masih terbatas pada tingkat dasar karena kurangnya pelatihan, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan sumber daya untuk menerapkan sistem pencatatan yang kompleks.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Arifin (2022) bahwa UMKM di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo masih belum optimal menerapkan sistem keuangan syariah, padahal laporan keuangan tersebut sangat penting guna memahami implementasi manajemen keuangan secara syariah. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam laporan keuangan UMKM di Kota Batu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam ranah akademis dan juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan manajemen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Langkah ini selaras dengan visi Indonesia yang ingin menjadi pusat ekonomi syariah global, di mana penguatan pemahaman akuntansi syariah di tingkat lokal menjadi langkah yang strategis. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menelaah implementasi Prinsip Syariah yang dilakukan oleh UMKM, dan mengetahui praktik pelaporan keuangan UMKM di Kota Batu.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian oleh Sari & Wijaya (2022) mengkaji tingkat adopsi SAK EMKM di kalangan UMKM di Jawa Tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa hanya 18% UMKM yang secara konsisten menerapkan standar ini, sementara 45% lainnya hanya menerapkan sebagian unsur SAK EMKM, seperti pencatatan pendapatan dan beban, tanpa menyusun laporan keuangan lengkap. Faktor penghambat utama meliputi tingkat kompleksitas yang

dirasakan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta ketidaksadaran akan manfaat pelaporan keuangan terstandarisasi.

Arifin (2022) melakukan penelitian di UMKM Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo, hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan sistem keuangan berbasis syariah bagi UMKM belum optimal dan laporan keuangan sangat penting guna memahami peran dan manfaat penerapan manajemen keuangan syariah bagi pelaksanaan usaha UMKM.

Harahap & Mardiyah (2023) meneliti hubungan antara penerapan SAK EMKM dengan akses pembiayaan perbankan pada UMKM di sektor manufaktur. Hasil penelitian membuktikan bahwa UMKM yang menerapkan SAK EMKM secara konsisten memiliki probabilitas 35% lebih tinggi untuk memperoleh persetujuan kredit dari bank. Laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik meningkatkan tingkat kepercayaan perbankan dan mempermudah proses due diligence. Namun, studi ini juga mengungkap tantangan berupa kesenjangan pemahaman antara pelaku UMKM dengan analis kredit bank dalam menafsirkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Studi Fatimah & Abdullah (2023) menganalisis efektivitas implementasi SAK EMKM melalui integrasi platform digital. Penelitian terhadap 150 UMKM di Jawa Timur menunjukkan bahwa adopsi aplikasi akuntansi berbasis cloud yang telah disesuaikan dengan SAK EMKM berhasil meningkatkan kepatuhan pelaporan hingga 58% dalam 6 bulan. Faktor pendukung keberhasilan meliputi antarmuka yang user-friendly, pelatihan pendampingan, dan integrasi dengan sistem perpajakan.

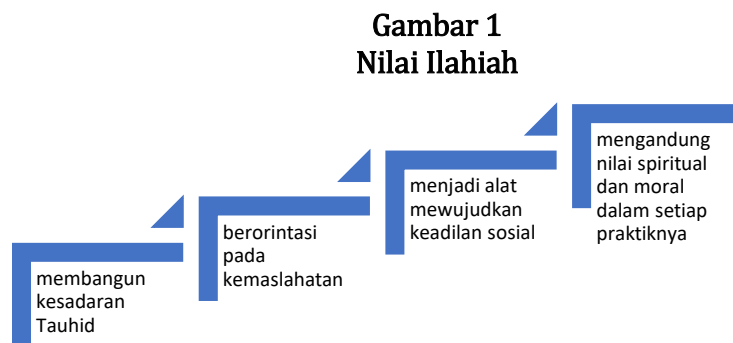
Penelitian oleh Novita & Sari (2024), menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi syariah di Kabupaten Bengkalis yang mayoritas penduduknya beragama islam masih terbatas pada tingkat dasar karena kurangnya pelatihan, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan sumber daya untuk menerapkan sistem pencatatan yang kompleks.

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris kata *to account* atau *accountancy*, yang artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Akuntansi syariah adalah

suatu sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama akuntansi syariah meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab (Ishak & Amalia, 2020; Mujiatun, 2013; Sandry, 2018).

Dalam bukunya, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Paradigma*, Triyuwono (2012) memberikan definisi bahwa akuntansi Syariah bukan sekedar Teknik pencatatan, tetapi merupakan bahasa yang merepresentasikan nilai-nilai ketuhanan (ilahiah) dalam praktik ekonomi. Akuntansi Syariah menekankan nilai ketuhanan (ilahiah) pada praktiknya: (1) membangun kesadaran Tauhid (mengakui keesaan Allah), (2) berorientasi pada kemaslahatan umat, (3) menjadi alat mewujudkan keadilan sosial (*al-adl*), serta (4) mengandung nilai spiritual dan moral dalam setiap praktiknya.



Sumber: Triyuwono (2012)

Definisi umum syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Secara lengkap, Akuntansi Syariah adalah proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat (tidak terbatas pada data keuangan) kepada para pemangku kepentingan suatu entitas dan memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas syariah islam dalam mencapai tujuan sosial ekonominya.

Nilai Dasar Akuntansi Syariah dalam Konteks Pelaporan Keuangan

1. Landasan Filosofis Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai alat teknis, namun merupakan manifestasi dari nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Baydoun & Willett

(2022) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* menegaskan bahwa akuntansi syariah dibangun atas paradigma tauhid yang mengintegrasikan dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan horizontal (*hablum minannas*). Prinsip kebenaran (*shiddiq*) menurut mereka merupakan fondasi etika yang memastikan bahwa informasi keuangan merepresentasikan realitas ekonomi yang sebenarnya, bukan sekadar kepatuhan formal.

2. Prinsip Keadilan sebagai Nilai Inti

Keadilan (*'adl*) dalam akuntansi syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep fairness dalam akuntansi konvensional. Adnan & Bakar (2020) dalam *International Journal of Economics, Management and Accounting* menjelaskan bahwa keadilan dalam konteks syariah mencakup *distributive justice* yang menjamin pembagian manfaat dan risiko secara proporsional kepada seluruh *stakeholder*. Implementasinya terlihat dalam mekanisme pembagian keuntungan yang transparan dan penghindaran eksploitasi dalam transaksi.

3. Sistem Pertanggungjawaban Komprehensif

Konsep pertanggungjawaban (*accountability*) dalam akuntansi syariah bersifat multidimensi. Menurut Harahap & Mardiyah (2023) dalam *Asian Journal of Accounting Research*, akuntabilitas syariah mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia serta lingkungan. Studi mereka menunjukkan bahwa konsep ini mendorong praktik pengungkapan (*disclosure*) yang lebih komprehensif, termasuk aspek sosial dan lingkungan.

4. Implementasi Larangan Riba

Larangan riba menjadi pembeda mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Penelitian Rahim, S., (2022) dalam *Journal of Islamic Finance* menganalisis implementasi prinsip ini melalui mekanisme purifikasi pendapatan, dimana unsur-unsur non-halal harus diidentifikasi dan didistribusikan kepada pihak yang berhak. Studi ini mengembangkan model teknis pemisahan pendapatan halal dan haram dalam laporan keuangan.

5. Integrasi Nilai-nilai Syariah dalam Kerangka Akuntansi

Perkembangan terbaru dalam standar akuntansi syariah diteliti oleh Sari & Wijaya (2023) dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Mereka

mengidentifikasi bahwa kerangka konseptual akuntansi syariah modern mengintegrasikan empat pilar utama: *truth and fairness, full disclosure, substance over form, dan prudence* dalam kerangka syariah. Integrasi ini menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya akurat tetapi juga beretika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah study kasus. Metode ini cocok untuk menggali dan memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti penerapan prinsip-prinsip syariah dan laporan keuangan yang dipraktikkan oleh UMKM di Kota Batu. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan pandangan pelaku UMKM (Creswell & Poth, 2018).

Jenis data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM di Kecamatan Batu, serta dokumentasi terhadap proses pencatatan keuangan. Pemilihan informan dipilih secara random sampling. Triangulasi dilakukan menggunakan triangulasi dokumen dan triangulasi sumber. Teknik analisis data mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disaring dan diringkas dengan memilih informasi yang relevan dan penting. Data yang tidak berhubungan atau kurang signifikan dikeluarkan, sehingga fokus analisis menjadi lebih tajam dan terarah.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, diagram, atau bagan yang memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data. Penyajian data ini berfungsi sebagai gambaran sistematis yang memudahkan peneliti dalam melihat keseluruhan konteks dan fenomena yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola dan tema yang muncul dari data yang disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi kembali dengan data asli untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan.

HASIL PENELITIAN

Pelaporan Keuangan pada UMKM di Kota Batu

Berikut ini merupakan data 8 informan pelaku UMKM di Kecamatan Batu yang menjadi sumber data primer. Keterbatasan waktu dan tenaga, membuat peneliti memperkecil objek penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Tabel 2
Daftar Pelaku UMKM di Kecamatan Batu, Kota Batu

No	Nama	Nama Usaha	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Sunanik	Toko Ike	Pemilik	SMK
2	Muttin	Roti Bakar Kenzie	Pemilik	D1 Akuntansi
3	Aprilia Dwi	Dawet Upin Ipin	Pemilik	SMK
4	M. Ayub	Hisana Fried Chicken	Kepala Toko	SMK
5	Handy Sulistyono	Bite It Donuts	Pemilik	SMA
6	Ponisri	Bakso Waris	Pemilik	SD
7	Sariati	Toko Ridho	Pemilik	SD
8	Irma	Jaya Bakery	Pemilik	SMK

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan pemilik usaha berbeda satu sama lain. Faktor tersebut tentu mengindikasikan perbedaan dalam pengelolaan usaha, baik itu dalam hal manajemen maupun keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang memberikan temuan adanya variasi dalam pembuatan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan terakhir dan pengetahuan pemilik usaha. Bu Muttin selaku owner dari Roti Bakar Kenzie yang memiliki latar Pendidikan D1 Akuntansi, mengatakan bahwa,

“Saya membuat laporan keuangan mbak, tapi sepertinya belum sesuai SAK-EMKM, yang saya buat itu sudah ada pencatatan hutang usaha, kemudian jurnal harian terkait pemasukan dan pengeluaran kayak biaya operasional atau persediaan. Untuk laporan bulannya hanya laporan laba rugi, belum sampai di neraca.”

Jawaban dari Bu Muttin dapat diinterpretasikan bahwa beliau telah membuat laporan keuangan, namun yang sederhana saja. Beliau juga tidak yakin mengenai pengetahuannya mengenai SAK-EMKM meskipun beliau memiliki latar belakang Akuntansi. hal itu juga dibuktikan dari pernyataan beliau tentang laporan bulanan yang hanya sampai laporan laba-rugi saja tidak sampai pada neraca, saat penulis melihat

laporan keuangan Bu Muttin juga hanya catatan keuangan secara manual saja. Perihal pembuatan laporan keuangan, M. Ayub juga memberikan pendapat yang serupa dengan ibu Muttin,

“Selama ini di Hisana *Fried Chicken* yang dibuat ada pencatatan *cash flow* dan laporan laba rugi yang wajib dibuat tiap bulan. Karena itu kebijakan dari perusahaan kan, mbak. Untuk pelaporan lain kayak aset, hutang, dan lain-lain mungkin ada tapi di kantor pusat gitu.”

Pernyataan dari M. Ayub yang sebagai kepala toko Hisana Fried Chicken juga sama dengan ibu Muttin, dia hanya melakukan pencatatan sederhana untuk di tokonya itu, dan itupun karena kebijakan dari perusahaan untuk mengadakan pencatatan *cash flow* dan laporan laba rugi. Untuk pencatatan yang lebih detail, M. Ayub tidak menerapkan di tokonya. Disisi lain, Handy mengelola usahanya sendiri dengan latar pendidikan SMA, mengatakan,

“Kalau untuk laporan keuangan ada, tapi bukan yang lengkap gitu kak, paling saya bikin pencatatan sederhana aja, kayak sewa rukonya berapa, habisnya kapan, biaya apa aja yang keluar, pemasukan pendapatan, terus nanti nentuin laba ruginya dari pemasukan dikurangi biaya gitu. Kalau yang kompleks saya masih terbatas pengetahuan.”

Penjelasan dari Handy juga sama dengan keterangan ketiga informan yang sebelumnya. Handy hanya melakukan pencatatan sebatas laporan laba rugi, yaitu mencatat pemasukan/pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dia keluarkan.

SAK-EMKM mengharuskan entitas untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Secara keseluruhan, ungkapan dari ketiga individu tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam menerapkan SAK-EMKM. Meskipun ada upaya untuk melakukan pencatatan keuangan, masih terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan dan pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Ibu Irma, Sunanik dan Aprilia, meskipun memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK, memberikan pernyataan yang hampir sama. Ibu Sunanik yang memiliki toko kelontongan yang diberi nama “Toko Ike” mengatakan bahwa, “Aku cuma bikin pencatatan transaksi harian kayak barang yang ke jual hari ini apa aja mbak, ndak ada laporan keuangannya.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Irma perihal laporan keuangan untuk usahanya yaitu Jaya Bakery,

“Nggak ada laporan keuangan gitu mbak, paling aku nentuin laba rugi pakai perkiraan aja. Soalnya nggak cukup waktunya, sambil ngurus anak. Kan rada ribet kalau bikin laporan keuangan.”

Pernyataan dua informan tersebut menunjukkan praktik akuntansi yang umum di kalangan pelaku UMKM adalah pencatatan sederhana yang dianggap sudah cukup untuk mengelola usaha mereka. Namun, SAK-EMKM menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dan kinerja usaha. Keterbatasan dalam pemahaman akuntansi, tantangan waktu, dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan komprehensif.

Di tempat terakhir, Ibu Ponisri yang memiliki latar belakang pendidikan SD tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Mereka memberikan pernyataan yang sama,

“*Ndak* ada laporan keuangan, mbak. *Seng* penting *arto e ono* (yang penting uangnya ada), ya itu *seng diputer* (diputar untuk usaha lagi). Alhamdulillah, usahanya tetep jalan selama ini”.

Hal tersebut dapat menjabarkan bahwa, pengelolaan keuangan usaha dilakukan secara informal dengan cara memutar dana sesuai kebutuhan tanpa adanya dokumentasi tertulis. Kondisi ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan dalam usaha. Pemahaman tentang kauntansi Syariah yang terbatas berakibat pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain itu juga dapat menghambat akses pembiayaan dari Lembaga keuangan yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha (Novita & Sari, 2024).

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara, pengelola UMKM di Kota Batu masih belum sepenuhnya memahami tentang pencatatan SAK-EMKM untuk UMKM. Mereka masih menggunakan system pencatatan manual, dan bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan dalam pengelolaan usahanya. Hal itu sesuai dengan temuan dari Arifin (2022), bahwa di Desa Jatiurip KecamatanKrejengan Probolinggo mayoritas UMKM masih belum mapu mengelola keuangan secara Syariah dan melakukan pencatatan transaksi keuangan yang sistematis.

Implementasi Nilai Ketuhanan (Ilahiah)

Prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti kebenaran, keadilan, pertanggungjawaban, dan larangan riba tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku UMKM dapat mengoptimalkan pengelolaan usaha mereka, sekaligus memenuhi tuntutan etika dan tanggung jawab sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pemilik UMKM di Kota Batu, meskipun sebagian besar dari mereka tidak menyusun laporan keuangan formal, pada kenyataannya mereka memiliki telah menerapkan nilai ketuhanan (ilahiah) dalam menjalankan usaha mereka. Para pelaku UMKM di Kota Batu menyadari pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu informan yang bernama Ibu Muttin mengatakan bahwa

“Menurut saya, jujur itu hal yang harus diutamakan dalam usaha, mbak. Usaha saya kan juga di pegang 3 karyawan yang nggak bisa saya pantau langsung di lapangan. Alhamdulillah selama ini selalu jujur. Karena bohong itu kadang bisa ngerugiin kan, mau itu ngerugiin saya sendiri, orang lain atau usaha yang saya jalanin.”

M. Ayub juga berpendapat yang sama dengan Bu Muttin,

“Saya selalu menerapkan kejujuran, mbak. Misal *nde* Hisana Fried Chicken *kan*, kalau sesuai SOP, produk yang sudah lebih dari 3 jam itu nggak boleh dijual. Makanya saya sama anak karyawan lain selalu ngikutin aturannya buat enggak jual produk yang udah lebih dari 3 jam.”

Ibu Muttin menekankan bahwa kejujuran adalah hal yang harus diutamakan dalam usaha, terutama ketika ia tidak dapat memantau karyawan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya merupakan nilai moral, tetapi juga merupakan strategi manajerial yang penting dalam mengelola risiko. Dalam konteks ini, kejujuran dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang membantu menjaga integritas operasional usaha. M. Ayub memberikan contoh konkret tentang penerapan kejujuran dalam operasional bisnisnya di Hisana Fried Chicken. Dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan mengenai produk yang telah disiapkan, ia tidak hanya menjaga kualitas produk tetapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai kejujuran dalam berbisnis menjadi salah satu pilar penting dalam praktik usaha mereka. Pernyataan yang mereka berikan

mencerminkan kesadaran yang tinggi akan etika bisnis, yang tidak hanya berpengaruh pada reputasi usaha, tetapi juga pada keberlanjutan dan keberkahan usaha itu sendiri. Praktik bisnis tersebut dapat merefleksikan nilai bisnis untuk kemaslahatan umat, dengan menjaga kualitas makanan serta mengandung nilai spiritual dan moral.

Nilai ilahiah akuntansi syariah juga dapat dilihat dari perlakuan adil Bu Sunanik dan Ibu Ponisri baik terhadap pelanggan, pemasok, maupun karyawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, salah satu informan yang bernama Ibu Sunanik mengatakan bahwa,

“Meskipun aku ndak bikin laporan keuangan, tapi Insya Allah aku bikin pencatatan yang adil kok, mbak. Kayak waktu ada pemasok datang buat ngasih barang, aku nyatetnya sesuai sama yang diterima. Nggak pernah ngelebihin atau ngurangin jumlahnya.”

Ibu Sunanik menekankan pentingnya keadilan dalam pencatatan transaksi, meskipun ia tidak menyusun laporan keuangan formal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran yang tinggi akan integritas dalam berbisnis. Di sisi lain, Ibu Ponisri, menunjukkan pendekatan yang seimbang dalam menentukan keuntungan usahanya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek biaya sebelum mengambil keuntungan, ia mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dari keputusan bisnisnya. Kedua informan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam praktik bisnis mereka tidak hanya berfungsi untuk memenuhi tuntutan etika, tetapi juga sebagai strategi untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Hasil wawancara dengan informan memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerapan nilai ketuhanan (ilahiah) pada akuntansi syariah, khususnya dalam konteks keadilan dalam bertransaksi. Meskipun mereka tidak menyusun laporan keuangan formal, kesadaran akan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi mencerminkan komitmen mereka terhadap etika bisnis yang baik.

Pertanggungjawaban adalah salah satu kunci kelancaran usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha, bisa berupa tanggung jawab kepada pihak pengguna laporan keuangan, dapat juga berupa pertanggungjawaban dari penjual kepada pembelinya. Berdasarkan hasil wawancara, Handy selaku owner dari Bite It Donuts mengatakan bahwa,

“Sebagai seorang pelaku usaha, saya merasa memiliki keharusan untuk membuat laporan keuangan, dalam hal ini digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada karyawan untuk menunjukkan transparansi pembagian gaji atau untuk pihak lain. Misalnya, ketika saya ingin mengajukan pembiayaan kepada Bank, laporan keuangan pasti sangat diperlukan. Meskipun, saya masih belum mahir dan masih acak-acakan mencatat aliran keuangan, setidaknya itu cukup baik untuk usaha yang baru saya jalankan.”

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang baik tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan pertanggungjawaban kepada karyawan, tetapi juga sebagai dokumen penting ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan, seperti bank. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait dan mendukung pertumbuhan usaha. Nilai ketuhanan Nampak pada pembuatan laporan keuangan oleh Handy digunakan sebagai alat untuk kemaslahatan sosial dan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. yang merupakan elemen kunci dalam kelancaran dan keberlanjutan usaha. Hasil ini sejalan dengan penelitian. (Sari & Wijaya, 2023)

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kota Batu terkait laporan keuangan berbasis SAK EMKM masih perlu diperhatikan. Pendidikan formal menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kurangnya literasi, keterbatasan waktu, dan tidak adanya pelatihan terkait Akuntansi Syariah juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Dari 8 informan, paling banyak mereka melakukan pencatatan di laporan laba-rugi dengan cara manual, dan dua informan tidak melakukan pencatatan keuangan. Penerapan nilai ketuhanan akuntansi syariah ini memberikan jawaban landasan moral dan etika dalam pengelolaan usaa, yang dapat membantu pelaku UMKM untuk tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan bisnis mereka. Meskipun tidak memiliki laporan keuangan formal, namun para informan telah melakukan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya, yaitu kebenaran atau kejujuran dalam transaksi, keadilan dengan para stakeholder, missal pemasok dan pelanggan, pertanggungjawaban kepada karyawan dan konsumen, serta tidak menjalankan praktik riba. Praktik bisnis dengan

prinsip syariah ini dapat menjadi modal penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Adnan, M. A., & Bakar, N. B. A. (2020). Justice in Islamic accounting: A conceptual framework. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 28(1), 1–22.
- Arifin, M. S. (2022). Sistem Keuangan Syariah Pada Umkm Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 117–126. <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v3i1.814>
- Baydoun, N., & Willett, R. (2022). Islamic accounting and the problem of interest. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 1–15.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Fatimah, S., & Abdullah, N. (2023). Digital Transformation in SAK EMKM Implementation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Harahap, M. S., & Mardiyah, A. (2023). SAK EMKM Implementation and Banking Credit Access. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Nashrullah, M., & Setiawan, I. (2023). Accounting Literacy Gap in Micro Enterprises. *Asian Journal of Business and Accounting*, 16(1), 112–130.
- Novita, R., & Sari, F. I. (2024). Pemahaman Akuntansi Syariah Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 15–30.
- Rahim, S., et al. (2022). Income purification in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 78–95.
- Sari, D. P., & Pratama, B. C. (2023). Financial Management Practices in Indonesian MSMEs. *Journal of Small Business Strategy*, 33(2), 45–62.
- Sari, D. P., & Wijaya, C. (2022). Adoption Level of SAK EMKM in Central Java MSMEs. *Journal of Indonesian Applied Economics*.
- Sari, D. P., & Wijaya, C. (2023). Development of sharia accounting conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 112–130.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori* (ketiga). Rajagrafindo Persada.
- Zain, M. M., & Rahman, R. A. (2020). The level of understanding and implementation of Islamic accounting among small and medium enterprises (SMEs) in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5).
- Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 67–82.

Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216

Sandry, Y. (2018). *Analisa Perlakuan Akuntansi Tabungan Emas Pada PT. Pengadaian Cabang Bengkalis Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah*. STIE Syariah Bengkalis